

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI KORUPSI PADA**

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

KELAS IA

SEMESTER II

TAHUN 2021


LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS 1A**


**Berdasarkan Permenpan Reformasi dan Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Dan Melayani**

**Disahkan di Banda Aceh
Pada hari Rabu, 06 Januari 2022**

Management Representative,


EDI SUBAGIYO, SH.MH
NIP.197406151993031001

Ketua Tim Survei,


ELVIYANTI PUTRI, SH.MH
NIP. 19740905 199903 2006

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A



AINAL MARDIAH, S.H., M.H
NIP. 19660504 199212 2 001

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Pengadilan negeri banda aceh kelas 1a mengadakan kegiatan survei hasil pelaksanaan hasil pelaksanaan survei persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A berdasarkan Permenpan Reformasi dan Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Survei ini menanyakan pendapat kepada masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A melalui pengisian kuisisioner aplikasi elektronik yang telah disediakan.

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A, diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbaikan dan peningkatan pelayanan publik khususnya dalam pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri banda Aceh. Sejauh ini Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan Survei Persepsi Korupsi pada tahun 2021, untuk keberlanjutan maka tahun ini Pengadilan Negeri Banda Aceh juga melakukan survei tersebut pada tahun 2022 sebagai acuan untuk perbaikan pelayanan kedepannya.

Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas survei dan laporan survei. Semoga survei ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya semua aparatur Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A.

Banda Aceh 06 Januari 2021

TIM SURVEI

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
11. Latar Belakang.....	1
12. Maksud Dan Tujuan.....	2
13. Landasan Hukum.....	2
14. Rencana Kerja.....	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
21. Metode Penelitian.....	5
22. Populasi Dan Sampel.....	5
23. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
24. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	6
25. Teknik Analisis Data.....	6
26. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
31. Profil responden.....	9
32. Indeks persepsi korupsi per indikator	12
33. Indeks Persepsi korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	18
34. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	20
BAB IV	22
PENUTUP	22
41. Kesimpulan.....	22
42. Rekomendasi.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya survei persepsi anti korupsi (SPAK) yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. LANDASAN HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- h) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik.

1.4. RENCANA KERJA

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi Anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- c. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu

Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner

kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan aplikasi elektronik SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) dan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. LOKASI PENELITIAN DAN UNIT ANALISIS

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN QUALITY CONTROL

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei SPAK.

2.5. TEKNIK ANALISA DATA

Analisis data untuk menentukan *Survei Persepsi Anti Korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya.

Teknik analisis perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Kuisisioner atau Aplikasi Elektronik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

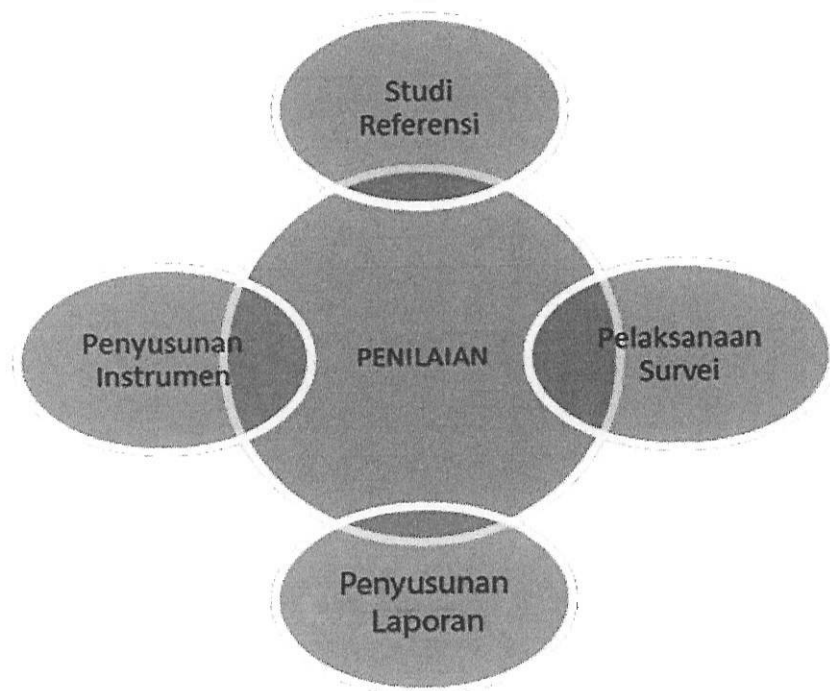
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. TAHAPAN PELAKSANA

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei SPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2**Ruang Lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3**Nilai Persepsi**

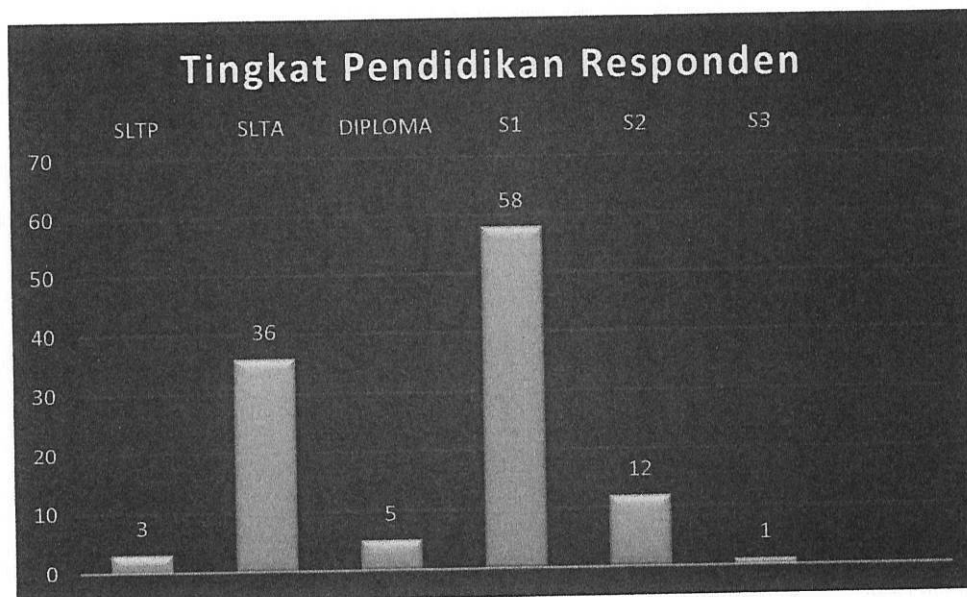
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi SPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. PROFIL RESPONDEN

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

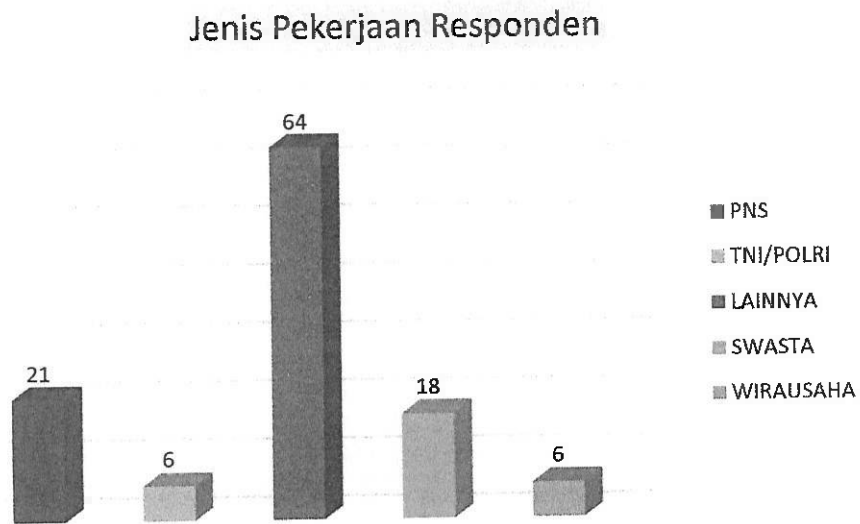
Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden



Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sarjana.

3.1.2. Pekerjaan Responden

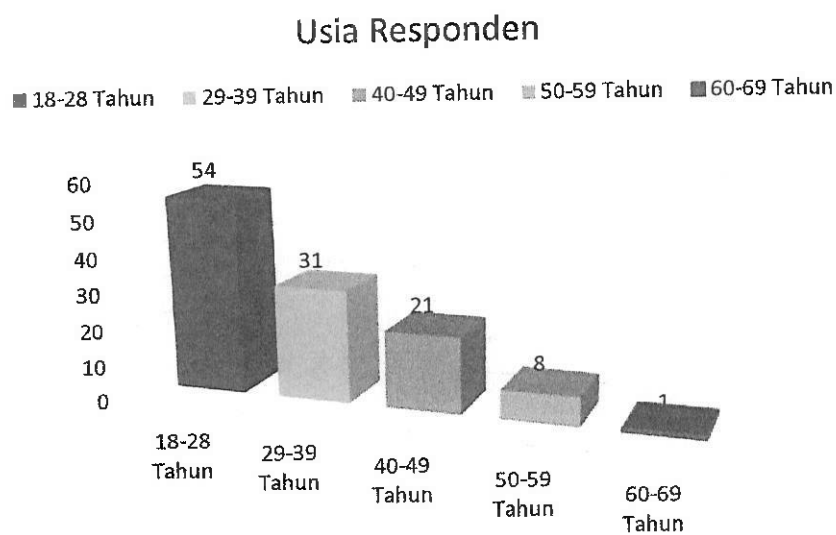
Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden



Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki pekerjaan sebagai pekerja lainnya.

3.1.3. Kelompok Usia Responden

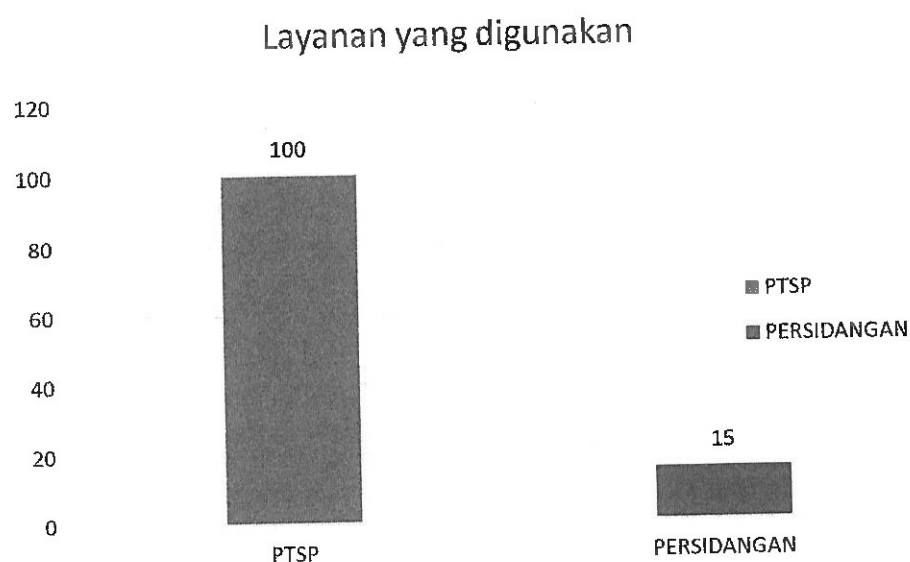
Tabel 7.
Usia Responden



Responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18-28 tahun dan diikuti oleh responden yang berada dalam kelompok usia 29-39 tahun.

3.1.4. Layanan Yang Digunakan

Tabel 8.
Jenis layanan yang dipergunakan responden

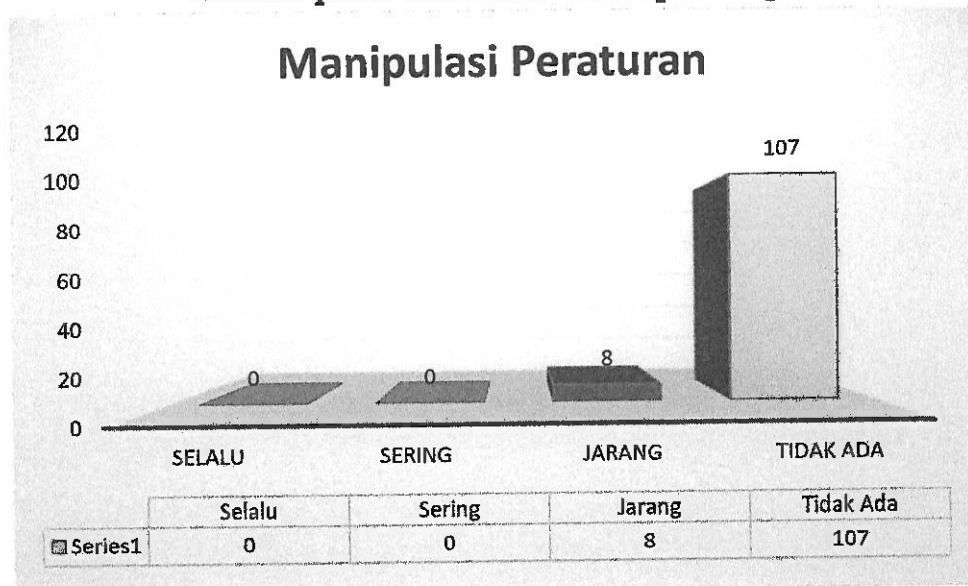


Jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden adalah Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu sebesar 100 responden.

3.2. SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PER INDIKATOR

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

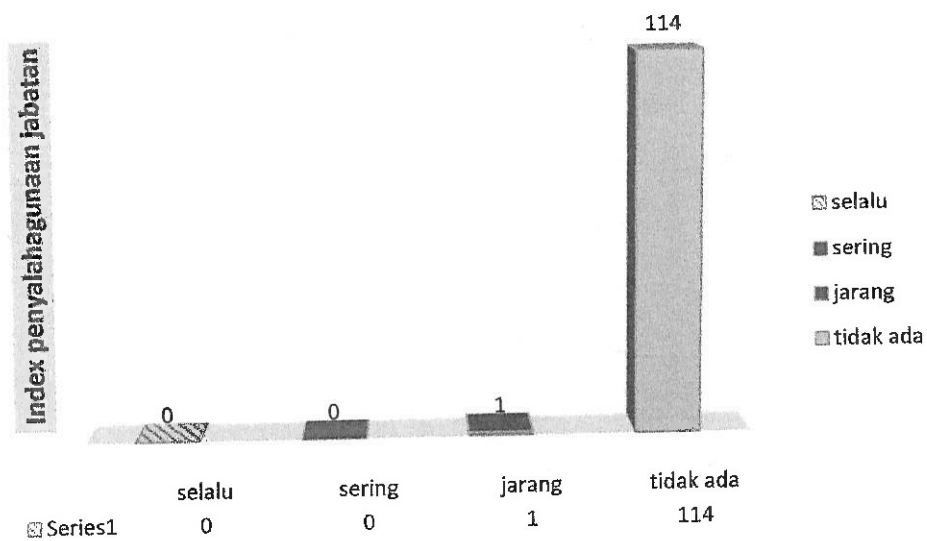


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks ke-3,93. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh bersih dari korupsi.

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.99. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bersih dari korupsi.

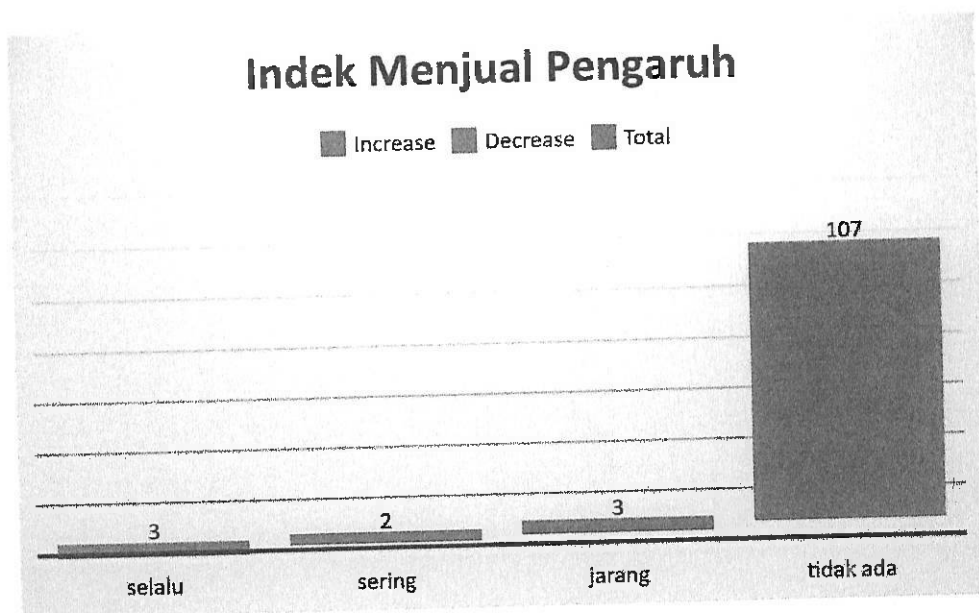
Tabel 10.
Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3.86. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Banda Aceh bersih dari korupsi.

Tabel 11.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

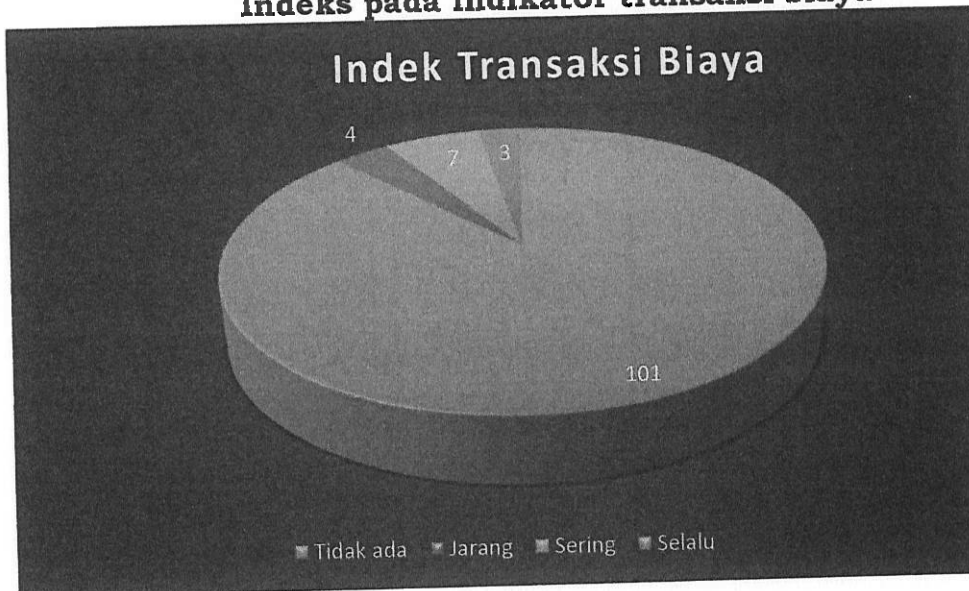


324. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3.79. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Banda Aceh bersih dari korupsi.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya

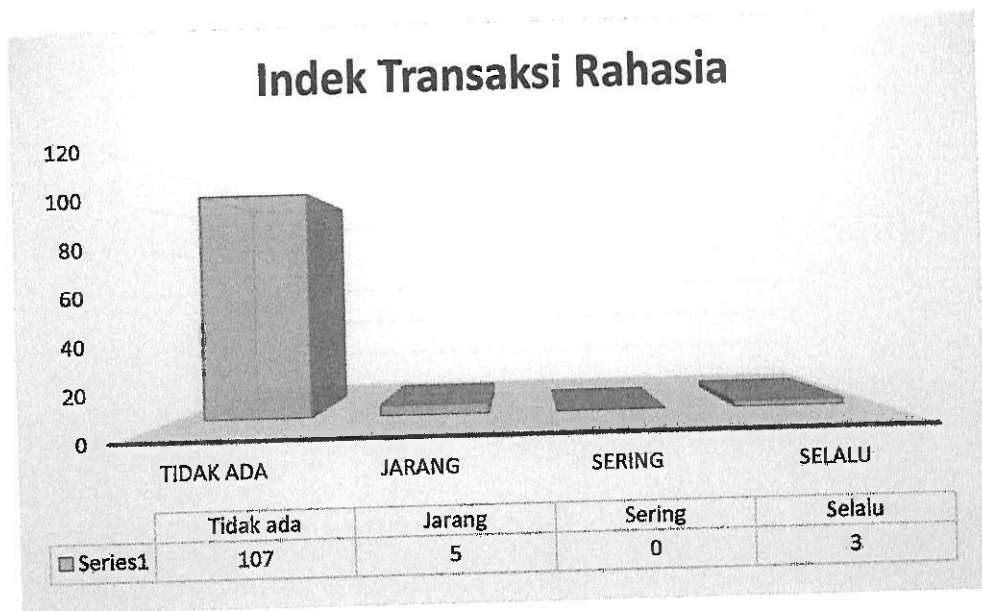


325. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3.88. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Banda Aceh bersih dari korupsi.

Tabel 13.

Tabel Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia

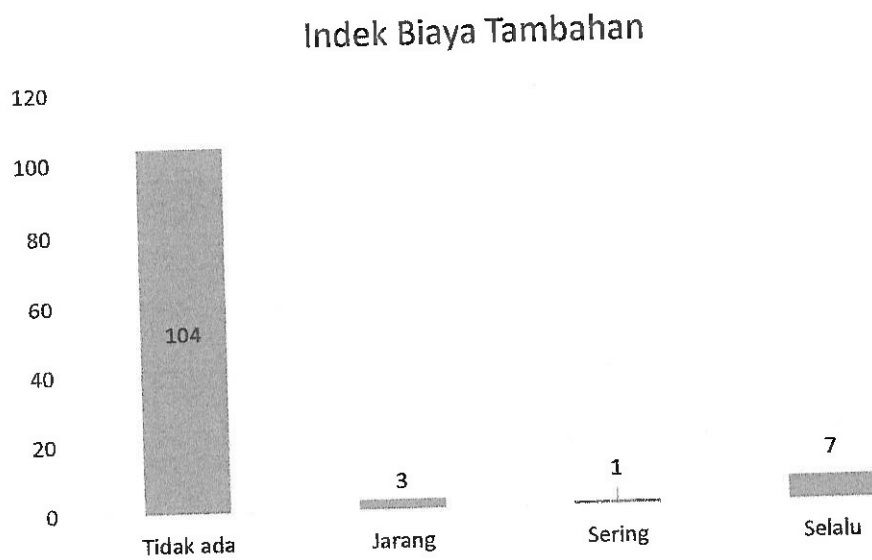


3.2.6 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,77. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Banda Aceh bersih dari korupsi.

Tabel 14.

Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan



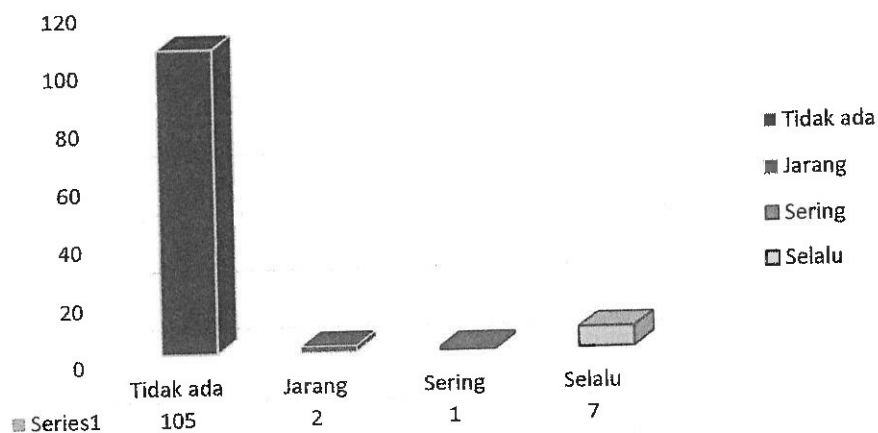
327. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3.78. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Banda Aceh bersih dari korupsi.

Tabel 15.

Indeks Pada Indikator Hadiah

Indek Indikator Hadiah

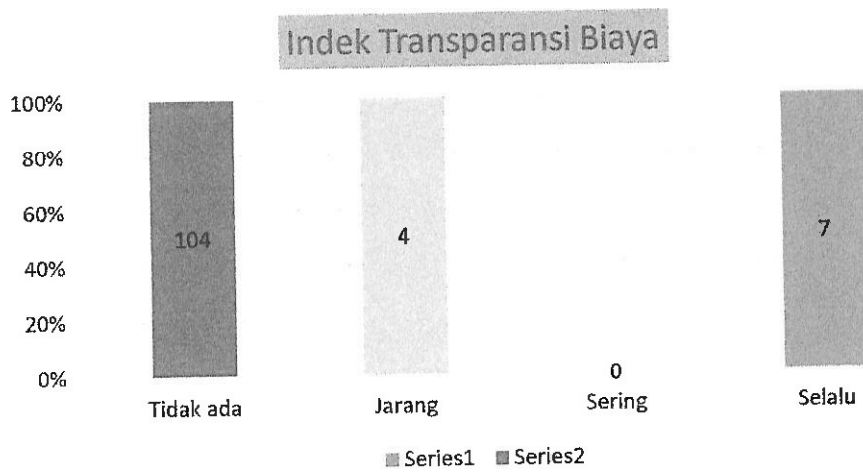


328. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3.78. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Banda Aceh cukup bersih dari korupsi.

Tabel 16.

Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

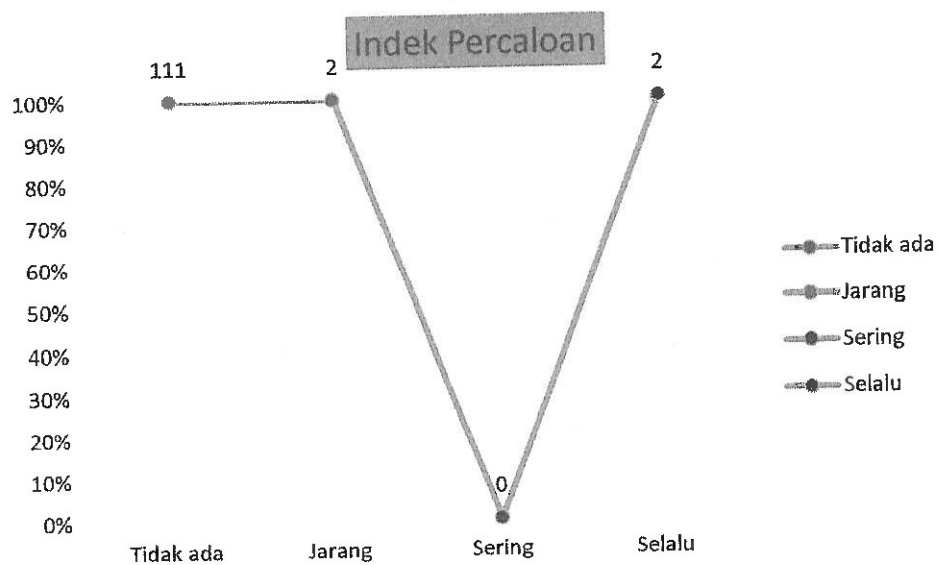


3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.93. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Banda Aceh bersih dari korupsi.

Tabel 17.

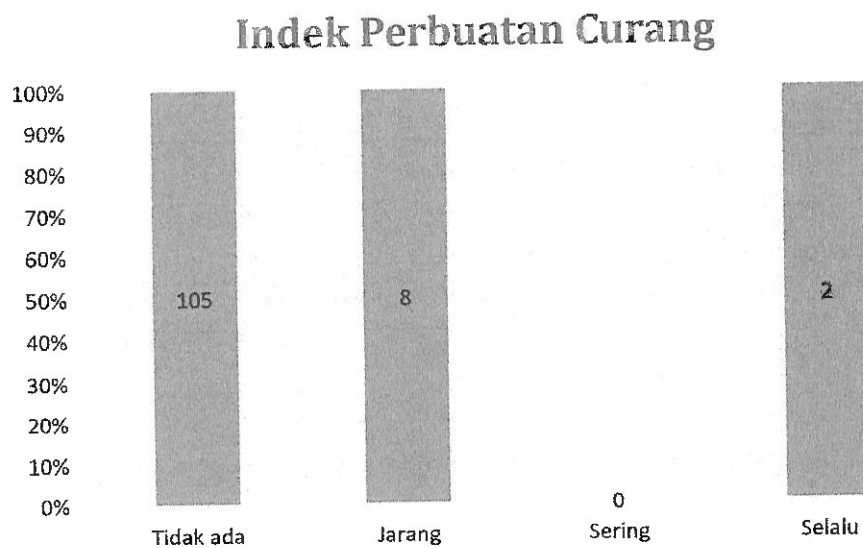
Indeks Pada Indikator Percaloan



3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3.88. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Banda Aceh bersih dari korupsi.

Tabel 18.
Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

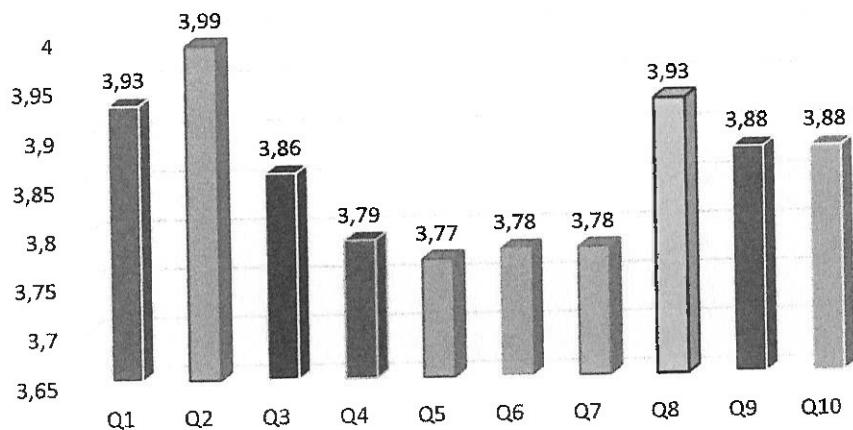


3.3. SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pengadilan Negeri Banda Aceh sebesar 3.86 bersih dari korupsi.

Tabel 19.
Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan
Negeri Banda Aceh



Tabel 20.
Survei Persepsi Anti Korupsi Juli s/d Desember 2021
Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh



Indeks 3.86 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Survei Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26-100.00;

Tabel 21.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Banda Aceh. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja
pada pengadilan**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Meningkatkan ketepatan waktu pelayanan
2	Bukti pembayaran harus sesuai dengan aturan
3	Pertahankan pelayanan terbaik tanpa ada nya perbedaan

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Banda Aceh diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi **3,86** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,93
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,99
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,86
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,79
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,77
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,78
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,78
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,93
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,88
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,88

4.2. REKOMENDASI

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 81,26 -100% atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator transparansi biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Lampiran 1. Hasil Analisa Data Survei Persepsi Anti Korupsi

No. Urut Responden	Unsur-Unsur Pertanyaan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	1	1	1	1	4	4	4
8	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
23	4	4	2	3	3	1	3	4	4	1
24	4	4	4	2	1	4	1	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No. Urut Responden	Unsur-Unsur Pertanyaan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	3	4	4	1
45	4	4	3	4	4	1	4	4	4	3
46	4	4	2	3	4	2	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	1	1	4	1	4	4	4
50	4	4	4	1	1	4	1	4	3	4
51	4	4	4	4	1	1	1	4	4	4
52	3	3	3	2	3	4	3	4	3	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	4	1	4	1	3
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No. Urut Responden	Unsur-Unsur Pertanyaan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	4	4	1	4	4	1	4	1	1	1
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	1	4	4	1	4	1	3	3
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
103	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
104	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
114	4	4	1	3	4	4	4	4	4	4
115	3	4	4	2	2	3	3	4	4	4
Jumlah Nilai Per Unsur	452	459	444	436	434	435	435	452	446	446
NRR Per Unsur	3,93	3,99	3,86	3,79	3,77	3,78	3,78	3,93	3,88	3,88
NRR Tertimbang	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39